

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dan Kemandirian Daerah Kabupaten Nabire terhadap Analisis Rasio Akuntabilitas

Ratna Dewi Iriani^{1*}, Kristian Hoegh Pride Lambe², Apriana Toding³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

rasyaraka140415@gmail.com

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Nabire. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik dan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Nabire selama periode penelitian. Analisis dilakukan melalui regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara tingkat transparansi laporan keuangan dan kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal serta kepercayaan publik.

Kata kunci: transparansi, laporan keuangan, kemandirian daerah, akuntabilitas publik, Kabupaten Nabire

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial report transparency on regional fiscal independence in the Government of Nabire Regency. The research is motivated by the demand for public accountability and the need to strengthen regional fiscal capacity in supporting sustainable development. A quantitative approach was employed using secondary data derived from the regional budget realization reports of Nabire Regency throughout the study period. The analysis was conducted through simple linear regression to examine the relationship between the level of financial report transparency and regional fiscal independence. The findings reveal that financial report transparency has a positive and significant effect on regional independence. This result indicates that higher transparency leads to greater capacity for the region to manage its financial resources independently, with less reliance on central government transfers. The study provides practical implications for local governments to improve the quality of accountable financial reporting as a means to enhance fiscal independence and strengthen public trust.

Keywords: transparency, financial reporting, regional independence, public accountability, Nabire Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah diterapkan lebih dari dua dekade dengan tujuan mendorong otonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 28,7%, sementara transfer pusat mencapai 65,7% dari total pendapatan daerah pada tahun 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024a). Bahkan, Kompas mencatat bahwa sebesar 68% pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat, sehingga mengindikasikan lemahnya basis penerimaan daerah (Kompas, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum mampu mandiri secara fiskal. Hanya 12 dari 34 provinsi di Indonesia yang tergolong mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung signifikan pada transfer pusat (Koridor, 2023). Di tingkat kabupaten/kota, ketimpangan lebih tajam. Beberapa daerah, terutama di Papua dan Indonesia timur, memiliki tingkat kemandirian fiskal di bawah 20%, sedangkan DKI Jakarta mencapai 69,4% (Republika, 2022).

Fenomena ketergantungan fiskal ini tidak hanya disebabkan lemahnya PAD, tetapi juga terkait rendahnya kualitas transparansi pelaporan keuangan daerah. Padahal, transparansi laporan keuangan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Putra, Riani, & Kurniawan, 2024). Transparansi yang baik diyakini dapat menjadi pendorong utama peningkatan kemandirian fiskal dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan (OECD, 2020).

Urgensi Penelitian

Berdasarkan fakta di atas, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana transparansi laporan keuangan dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks Kabupaten Nabire yang masih sangat bergantung pada transfer pusat, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai peran transparansi keuangan dalam memperkuat akuntabilitas publik dan kapasitas fiskal daerah, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan

kebijakan peningkatan kemandirian fiskal di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi laporan keuangan didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, dapat diakses, dan dipahami oleh publik sehingga mendukung akuntabilitas (Widyaningsih, 2010; OECD, 2020). Keterbukaan ini meliputi aspek ketepatan waktu, kelengkapan, serta keandalan informasi yang disajikan (Ridha & Basuki, 2012).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan mendorong peningkatan kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan fiskal (Setyaningrum & Syafitri, 2021). Di tingkat daerah, transparansi juga berkorelasi positif dengan kualitas belanja publik dan efisiensi fiskal (Putra, Riani, & Kurniawan, 2024).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung signifikan pada transfer dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2019). Tingkat kemandirian ini biasanya diukur melalui rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah (Nordriawan et al., 2018).

Penelitian Mutiarni (2020) menegaskan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih berada pada kategori “instruktif” atau “konsultatif” karena PAD belum mampu menopang kebutuhan fiskal daerah. Temuan Kementerian Keuangan (2024) juga menunjukkan bahwa lebih dari 65% pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat, yang menandakan rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Akuntabilitas Keuangan Publik

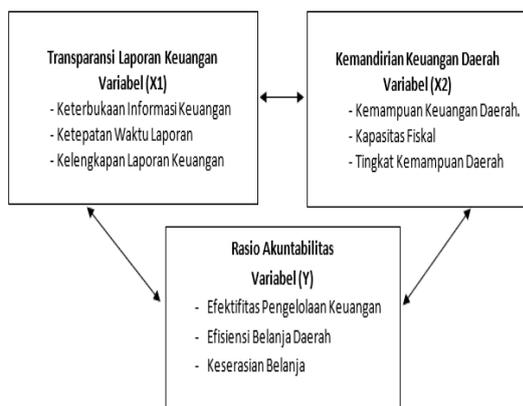
Akuntabilitas keuangan publik adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas melalui laporan keuangan yang sesuai standar (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah

wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri RI, 2019).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, karena laporan yang terbuka meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Nasution & Ramadhan, 2022). Selain itu, kemandirian keuangan daerah juga menjadi determinan penting dalam membangun akuntabilitas, karena daerah yang lebih mandiri memiliki insentif untuk mengelola anggaran secara lebih efisien dan bertanggung jawab (Sari & Nugroho, 2021).

Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, transparansi laporan keuangan dan kemandirian keuangan daerah sama-sama berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Transparansi memastikan masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran, sementara kemandirian daerah mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mendorong optimalisasi PAD. Kerangka pemikiran ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menemukan bahwa daerah dengan transparansi keuangan tinggi dan kemandirian fiskal lebih baik cenderung memiliki akuntabilitas publik yang lebih tinggi (Putra et al., 2024).



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh transparansi laporan keuangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire. Desain penelitian kuantitatif dipilih karena mampu memberikan pengukuran objektif melalui data numerik serta analisis statistik yang dapat mengidentifikasi hubungan antarvariabel secara sistematis (Creswell & Creswell, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan bukti empiris yang dapat digeneralisasikan ke konteks yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dengan periode penelitian tahun 2020–2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BPKAD dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Waktu penelitian berlangsung selama semester pertama tahun 2024, dengan cakupan analisis data laporan keuangan daerah lima tahun terakhir. Pemilihan periode lima tahun dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tren transparansi, kemandirian fiskal, serta akuntabilitas daerah yang lebih representatif (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Nabire yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, berjumlah 78 orang. Dari populasi tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 30 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan, 2016). Kriteria yang digunakan adalah pegawai yang memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang pengelolaan keuangan daerah, agar dapat memberikan jawaban yang lebih valid terkait variabel penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengukur indikator transparansi laporan keuangan, kemandirian daerah, dan akuntabilitas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan realisasi APBD Kabupaten Nabire tahun 2020–2024, termasuk rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat dan provinsi, serta

data realisasi belanja. Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder bertujuan memperkuat validitas hasil penelitian (Sekaran & Bougie, 2020).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis rasio keuangan dan analisis regresi linier berganda. Analisis rasio digunakan untuk mengukur efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, serta keserasian belanja sebagai indikator kinerja keuangan (Nordawati et al., 2018). Selanjutnya, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh transparansi laporan keuangan (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap akuntabilitas keuangan (Y). Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memastikan validitas model regresi (Gujarati, Porter, & Gunasekar, 2021). Hasil analisis diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk memperoleh nilai koefisien determinasi (R²), uji F, dan uji t, sehingga dapat diketahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 30 orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kriteria purposive sampling, seluruh responden memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang keuangan daerah. Tabel berikut menyajikan ringkasan karakteristik responden:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	18	60%
	Perempuan	12	40%
	25–35 tahun	8	26,7%
Usia	36–45 tahun	15	50%
	>45 tahun	7	23,3%
Pendidikan	S1	22	73,3%
	S2	8	26,7%
	2–5 tahun	10	33,3%
Masa Kerja	6–10 tahun	12	40%
	>10 tahun	8	26,7%

Sumber: Data primer diolah (2025)

Mayoritas responden berusia 36–45 tahun (50%), berpendidikan S1 (73,3%), dan memiliki masa kerja antara 6–10 tahun (40%). Hal ini menunjukkan bahwa responden relatif berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dapat memberikan penilaian yang valid terhadap variabel penelitian.

Hasil Analisis Statistik

Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian diuji validitasnya dengan korelasi Pearson Product-Moment. Semua item pertanyaan untuk variabel Transparansi Laporan Keuangan (X1), Kemandirian Daerah (X2), dan Akuntabilitas (Y) memiliki nilai *r hitung* > *r tabel* (0,361; α=0,05; n=30), sehingga dinyatakan valid.

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai >0,7 pada seluruh variabel, yang berarti instrumen reliabel (Sekaran & Bougie, 2020).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

dimana:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X1 = Transparansi Laporan Keuangan

X2 = Kemandirian Daerah

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Transparansi (X1)	0,421	3,212	0,003	Signifikan
Kemandirian Daerah (X2)	0,367	2,874	0,007	Signifikan
Konstanta (α)	1,152	–	–	–
R ² = 0,612		F = 21,653	Sig. 0,000	Model signifikan

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Interpretasi Hasil Uji

Transparansi laporan keuangan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas (*p* < 0,05). Semakin tinggi keterbukaan informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan keuangan, semakin tinggi pula akuntabilitas pemerintah daerah.

Kemandirian daerah (X2) juga berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas (*p* < 0,05). Hal ini berarti semakin

besar PAD dan kapasitas fiskal daerah, semakin kuat pula akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Koefisien determinasi ($R^2 = 0,612$) menunjukkan bahwa 61,2% variasi akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh transparansi dan kemandirian daerah. Sisanya 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nabire. Hal ini konsisten dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2021), yang menemukan bahwa keterbukaan dan ketepatan laporan keuangan meningkatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik. Transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan APBD, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, kemandirian keuangan daerah terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas. Daerah dengan ketergantungan rendah pada transfer pusat cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengelola PAD dan belanja daerahnya. Hasil ini mendukung temuan Sari dan Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal meningkatkan akuntabilitas publik karena pemerintah daerah memiliki insentif lebih kuat untuk mengelola keuangan secara efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab hipotesis bahwa transparansi laporan keuangan (X1) dan kemandirian daerah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas (Y). Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan dan penguatan PAD merupakan strategi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nabire pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini **diterima**.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin transparan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dicapai. Transparansi yang mencakup keterbukaan informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan keuangan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta legitimasi pemerintah.

Selain itu, kemandirian fiskal terbukti menjadi faktor kunci yang meningkatkan akuntabilitas. Daerah yang mampu mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat memiliki insentif lebih besar untuk mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi agenda strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat literatur mengenai hubungan antara transparansi, kemandirian fiskal, dan akuntabilitas keuangan publik. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan berbasis akrual, sekaligus mengembangkan strategi peningkatan PAD agar kemandirian fiskal dapat dicapai secara berkelanjutan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif kecil, yaitu hanya melibatkan pegawai BPKAD Kabupaten Nabire, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke semua daerah di Indonesia. Selain itu, variabel penelitian hanya mencakup transparansi laporan keuangan dan kemandirian daerah, sementara faktor lain seperti pengawasan internal, partisipasi masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel lintas daerah, menambah variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Gunasekar, S. (2021). *Basic econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ivani, K. A., Lambe, K. H. P., & Irdawati, I. (2024). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 6(2), 125–132. <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/235>
- Kambuno S, R., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). The Effect of Dividend Policy , Profitability and Liquidity on Company Value at PT . Gudang Garam Tbk on The Indonesia Stock Exchange. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 44–49. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.305>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Kemandirian fiskal antara cita-cita dan realita bergantung pada transfer pusat. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>
- Kompas. (2023, October 3). Dua dekade desentralisasi: Daerah belum sepenuhnya mandiri fiskal. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id>
- Koridor. (2023, July 13). Kemandirian fiskal terwujud hanya di 12 provinsi. *Koridor.co.id*. <https://koridor.co.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Mutiarni, A. (2020). Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–156. <https://doi.org/10.30223/jekp.v11i2.2020>
- Nasution, A., & Ramadhan, F. (2022). Transparency and public accountability in local government financial reporting. *Journal of Public Sector Accounting*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.85243/jpsa.v4i1.2022>
- Nordiawan, D., Putra, A., & Dewi, K. (2018). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- OECD. (2020). *Budgeting and public expenditures*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/budget-2020-en>
- Putra, A., Riani, E., & Kurniawan, D. (2024). Fiscal decentralization and regional financial independence in Indonesia. *Jurnal Tatakelola Pemerintahan Daerah*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.1421/jtpm.v6i1.4131>
- Ratna Sari, D., Safiri, D. E., & Najib, M. T. A. (2025). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Tahun 2022-2024. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 3(1), 123–131. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.356>
- Republika. (2022, August 14). Menakar kinerja desentralisasi fiskal di Indonesia. *Republika.id*. <https://www.republika.id>
- Ridha, M., & Basuki, B. (2012). Determinants of transparency in financial reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 181–196.
- Sari, M., & Nugroho, R. (2021). Regional fiscal independence and accountability in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 65–77. <https://doi.org/10.95734/jap.v5i2.2021>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, R. (2021). Financial transparency and accountability in local government: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1958421. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.19>

[58421](#)

- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo Pendahuluan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 1–11. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977
- Widyaningsih, A. (2010). Transparansi pelaporan keuangan pada organisasi publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 15–27.